

**ANALISIS PERKEMBANGAN KOPERASI
PADAMASA PANDEMI COVID 19
DI KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

SULAIMI PUTRA UTAMA
1705906010087



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH – ACEH BARAT
2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59 Telp.: 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboeh, 30 agustus 2021

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Sulaimi Putra Utama

Nim : 1705906010087

Dengan judul : **ANALISIS PERKEMBANGAN KOPERASI PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN ACEH BARAT.**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

Mengeasahkan

Pembimbing

Alisman S,E M.Si
NIDN :0113026404

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Prof.Dr.T.Zulham,S.E.,M.Si
NIP. 196002121989031003

Dr.Helmi Noviar, S.E M.Si
NIP. 197411052021211002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59 Telp.: 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboeh, 30 agustus 2021

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Sulaimi Putra Utama

Nim : 1705906010087

Dengan judul : **ANALISIS PERKEMBANGAN KOPERASI PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN ACEH BARAT.**

Yang telah dipertahankan didepan komisi Ujian pada September 2021 dan memenuhi syarat untuk diterima.

Menyetujui,
Komisi Ujian

Tanda Tangan

- | | | |
|-----------------|------------------------------|-------|
| 1. Ketua Sidang | : Alisman, S.E M.Si | |
| 2. Sekretaris | : Leli Putri Ansari S.E M.Si | |
| 3. Anggota | : Affandi S.E M.Si | |

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Dr.Helmi Noviar, S.E M.Si
NIP. 197411052021211002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sulaimi Putra Utama

NIM : 1705906010087

Dengan ini Saya menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 23 Maret 2021

Saya yang membuat pernyataan,

SULAIMI PUTRA UTAMA

NIM. 1705906010087

BIODATA

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Sulaimi Putra Utama
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Pasi Meugat, 23 - Maret – 1999
3. Alamat : Jln. Meureubo – Pante Ceureumeun, Desa Pasi Meugat
4. NIM : 1705906010087
5. Nomor HP : 0822-3957-8673
6. Agama : Islam
7. E-mail : sulaimiputrautama@gmail.com

II. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD NEGERI PASI MEUGAT : Tahun 2005 - 2011
2. MTSN 2 ACEH BARAT : Tahun 2011 - 2014
3. MAN 1 ACEH BARAT : Tahun 2014 - 2017
4. UNIVERSITAS TEUKU UMAR : Tahun 2017 - 2021

III. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Badan Eksekutif Mahasiswa : 2018-2019
2. Bendahara MUBES Ekonomi : 2017
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan : 2017 -2018

IV. ORANG TUA

- Ayah : Hamdan
- Pekerjaan : Supir
- Ibu : Baidah
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

“Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang”

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta ditambahkan kepadanya tujuh laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan ada ada habis-habisnya di tuliskan kalimat Allah sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana (Q.S Lukman :27)

Ya Allah....

Sujud syukur kupersembahkan kepadaMu Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas takdir Mu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, beriman, berilmu dan bersabar menjalani kehidupan di dunia ini, segala puji bagimu ya Allah engkau telah memberikan kesempatan kesehatan kan dari awal perjuangan ku. Alhamdulillah setelah Kurang 4 tahun akhirnya aku berhasil meraih gelar ekonomi.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada semua orang yang ku sayangi yaitu kepada Kedua orang tuaku.

Ayah dan mama tercinta

Sebagai dana bakti dan hormat saya yang tiada terhingga aku persembahkan karya seni karena ini untuk ayah tersayang (Hamdan) dan Ibunda tercinta (Baidah) yang tiada pernah hentinya selama ini memberi semangat doa dorongan nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.

Ayah dan ibu trimalah bukti kecil ini sebagai kado terindah untuk membalas pengorbananmu selama ini.

Untuk kakek dan nenek

Terima kasih untuk kakek (Basyafari) dan nenek (Latifah) yang telah memberikan doa yang tulus kepada saya dan kepada nenek yang telah merawat Saya dari kecil hingga saat ini , karena beliaulah yang mengurus saya ketika saya sakit dan saya sangat berterima kasih kepada nenek saya.

Kepada keluarga saya ucapkan terima kasih karena telah menasehati saya selama ini agar dapat menyelesaikan kuliah terkhususnya kepada Yah teungoeh saya (Agus Diantoro) karena beliau adalah motivator saya dalam kuliah.

kepada dosen Pembimbing tugas akhir saya,

Bapak Alisman S.E M.Si selaku pemimpin pembimbing tugas akhir saya, saya mengucapkan beribu terima kasih karena telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya. Terima kasih telah membimbing dan memberikan arahan kepada saya, insya Allah saya tidak akan pernah melupakan kebaikan bapak atas segala bantuan dan motivasinya.

Kepada Dosen wali saya Ibu Okta Rabiana Risma, S.E M.Si yang telah memotivasi serta mendorong saya agar selalu semangat dalam kuliah, Terima kasih banyak bu berkat arahan ibu saya dapat menyelesaikan mata kuliah.

Seluruh dosen pengajar di fakultas Ekonomi

Terima kasih banyak untuk semua ilmu, pendidikan dan pengalaman yang sangat berat yang telah kalian berikan kepada saya.

Staf akademik

Semua staf akademik saya ucapkan terima kasih atas bantuannya yang telah mempermudah saya ya selama ini.

Dan untuk teman-teman sekalian yang saya banggakan, sekaligus untuk sahabat saya Faris Mubarak, David Maulana, Sutriana, Meta, Raudhathunnajah, Irfandi, Sri Mulyani, dan kawan-kawan seangkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu .

Teruntuk istimewa kepada Calon Istri saya Fina Zurlina yang telah mendukung saya membuat Skripsi ini dengan penuh dorongan dan pemaksaan agar Skripsi ini cepat selesai.

Untuk hidup yang penuh dengan makna, jutaan impian yang harus digapai, teruslah belajar, ikhtiar dan berdoa untuk menggapai tujuan. Seseorang yang kalah adalah seseorang yang berhenti berusaha.

“Man Jadda Wa Jadda”

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas kuasa-Nya yang telah memberikan nikmat sehat dan lapang dada kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi yang berjudul “*Analisis Perkembangan Koperasi Selama Pandemi Covid 19 di Kabupaten Aceh Barat*” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan tulus, ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Hamdan dan Ibunda tercinta Baidah, yang telah memberikan semangat dan dukungan baik moral, material, fasilitas serta doa yang tiada henti dipanjatkan untuk kesuksesan penulis hingga saat ini.
2. Bapak Alisman, SE.M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dorongan, masukan-masukan dan dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof Dr. T. Zulham, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

4. Bapak Dr. Helmi Noviar, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan dengan saya, dan saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang selama ini telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini dan menemani saya selama berkuliah di Universitas Teuku Umar.
7. Perpustakaan Universitas Teuku Umar yang telah menyediakan banyak materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat balasan dari Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Meulaboh, 23 Maret 2021
Penulis,

Sulaimi Putra Utama

ABSTRAK

Perkembangan koperasi pada masa Pandemi covid-19 di Kabupaten Aceh Barat, sejak terjadinya pandemi covid 19 permasalahan ekonomi mulai muncul, karena setiap orang berpotensi terjangkit oleh virus Covid 19. Covid 19 muncul di Indonesia pada awal tahun 2020 sehingga permasalahan-permasalahan di bidang ekonomi muncul, serta perkembangan perkoperasian di Kabupaten Aceh Barat juga mengalami imbasnya. Berbagai masalah muncul pada perkoperasian di Aceh Barat yang disebabkan oleh covid-19 dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan koperasi di Kabupaten Aceh Barat selama pandemi covid 19 dan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh koperasi pada masa pendudukan Covid 19. Metode penelitian yaitu kualitatif adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Serta data perkembangan koperasi selama pandemi covid 19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan analisa diperoleh bahwa perkembangan koperasi pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Aceh Barat cenderung tidak berkembang hal ini disebabkan oleh tidak adanya kepengurusan yang aktif dan disebabkan oleh pandemi covid 19, Kurangnya dana, serta faktor lainnya yang menyebabkan koperasi-koperasi di kabupaten Aceh Barat cenderung tidak berkembang.

Kata kunci : Perkembangan Koperasi, Covid 19 dan Permasalahan Koperasi.

ABSTRACT

The development of cooperatives during the Covid-19 Pandemic in West Aceh Regency, since the covid 19 pandemic economic problems began to emerge, because everyone has the potential to be infected by the Covid 19 virus. Covid 19 appeared in Indonesia in early 2020 so that problems in the economy emerged, and the development of cooperatives in Aceh Barat district was also affected. Various problems arise in cooperatives in West Aceh caused by covid-19 and this study aims to determine the development of cooperatives in West Aceh district during the covid 19 pandemic and find out the problems faced by cooperatives during the Covid 19 occupation. The research method is qualitative while the data sources used are primary data and secondary data. As well as data on the development of cooperatives during the covid 19 pandemic. This study uses a descriptive method. Based on the analysis, it was found that the development of cooperatives during the covid-19 pandemic in West Aceh Regency tended not to develop this was due to the absence of active management and was caused by the covid 19 pandemic, lack of funds, and other factors that caused cooperatives in West Aceh district. tend not to develop.

Keyword: Cooperative Development, Covid 19 and Cooperative Problems.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
BIODATA	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Teori-Teori Koperasi.....	12
2.2 Definisi Koperasi	17
2.3 Langkah-Langkah Mendirikan Koperasi	18
2.3.1 Perkembangan Koperasi Di Indonesia	21
2.3.2 Kondisi Koperasi di Indonesia Setelah Merdeka	23
2.3.3 Koperasi di Indonesia pada Zaman Orde Baru Hingga Sekarang.....	24
2.4 Penelitian Terdahulu	27
2.5 Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Metode Penelitian	32
3.1.1 Populasi dan Sampel Data.....	32
3.2 Sumber Data.....	33
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	33

3.4	Teknik Penentuan Informan.....	34
3.5	Instrumen Penelitian	34
3.6	Teknik Analisis Data.....	35
3.7	Lokasi Penelitian.....	35
3.8	Definisi Operasional Variabel.....	35
BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		36
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1	Geografis Kabupaten Aceh Barat	36
4.2	Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat.....	37
4.3	Hasil Penelitian	38
4.3.1	Perkembangan Koperasi Pada Masa Pandemi Covid 19	40
4.3.2	Bantuan Presiden Di Masa Pandemi Covid 19	51
4.3.3	Permasalahan Dan Hambatan Koperasi Di Kabupaten Aceh Barat.....	52
4.4	Pembahasan.....	55
4.4.1	Analisis Perkembangan Koperasi Pada Masa Covid 19 Di Kabupaten Aceh Barat	55
4.4.3	Perkembangan Koperasi Selama Pandemi Covid 19	58
4.5	Kendala Yang Menghambat Dinas Perdagangan Dalam Perkembangan Koperasi Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Aceh Barat	59
BAB V PENUTUP		61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Koperasi di Kabupaten Aceh Barat 2017-2021.....	8
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1 Jenis dan Koperasi aktif dan koperasi yang tidak aktif.....	38

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Koperasi Pada Tahun 2017-2021 di Kabupaten Aceh Barat.....9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara etimologi, pengertian koperasi berasal dari kata "*co-operation*" yang berarti kerjasama. Co berarti bersama dan operation artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Serta dalam Pasal 3 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa tujuan koperasi di Indonesia adalah "Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945" (Ekonomi koperasi, 2002:3). Muhammad Hatta yang diberi gelar sebagai bapak Koperasi juga memberikan definisi koperasi lebih sederhana namun jelas padat dan tidak lama terkandung suatu visi dan misi, beliau mengatakan "koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang." (Ekonomi Koperasi, 2002:4).

Sejak kasus covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi seperti Jabodetabek. Pada tanggal 1 april 2020 jumlah pasien positif covid-19 di Indonesia menjadi sebanyak 1.677 orang dari 1.677 kasus positif covid-19 tersebut, 1.417 pasien saat ini menjalani perawatan dan 103 pasien dinyatakan berhasil sembuh dari penyakit covid-19berita ini dikutip dari Kompas 18 januari 2020. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat (Kompas, 2020).

Penyebaran covid 19 ini juga berimbas ke daerah-daerah yang berada di Indonesia, Khususnya Aceh. Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Aceh Aliamin menyatakan aktivitas ekonomi masyarakat harus tetap berjalan di tengah pandemi covid-19, agar segala kebutuhan dasar penduduk tetap terpenuhi dengan baik. Koperasi yang ada di Aceh Barat terdiri beberapa macam koperasi yaitu: Koperasi Unit Desa, Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Simpan Pinjam, Karyawan, Serba Usaha, Wanita, Dagang Pasar, Primkop TNI/POLRI, Pertanian, Perhutanan/Perkebunan, Perikanan, Pertenakan, Pemuda, Industri, Angkutan, Pensiunan, Produksi, Konsumen, dan Koperasi Jasa, dari beberapa koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat maka peneliti memfokuskan untuk meneliti perkembangan koperasi pada masa pademi covid 19.

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, serta efek dari pandemi covid 19 ini juga berimbas pada koperasi yang berada di Kabupaten Aceh Barat, ada berbagai banyak hal yang terjadi dimasa pandemi covid 19 ini, setiap orang memiliki potensi terinfeksi virus ini, dan jelas hal ini dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pada masa transisi setelah fokus terhadapantisipasi dan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang cukup menyita perhatian, waktu serta energi ekstra dari Pemerintah Aceh. Sehingga banyak program kerja dan usaha untuk membangun Aceh menjadi terganggu. Demikian juga dampak serius disamping kesehatan, sosial masyarakat, juga masalah, ekonomi. Karena hampir semua sektor ekonomi menjadi tidak berdaya bahkan banyak usaha ekonomi rakyat dan kegiatan produksi terhenti. Dalam masa transisi menuju "New Normal live" (tatanan hidup normal) saat ini, sebaiknya ada kebijakan strategis Pemerintah Aceh yaitu: Pertama, Penanganan Jaring Pengaman Sosial (Penanggulangan Sosial). Kedua menghidupkan serta menggairahkan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta sektor informal, Industri rumah tangga, jasa, transportasi/travel, penginapan/perhotelan, pariwisata, kuliner. Ketiga, memberikan Insentif dan kemudahan usaha bagi berbagai sektor yang terkait dengan perekonomian termasuk pertanian, perkebunan, perikanan/nelayan, peternakan, hortikultura, sayur mayur dan lain sebagainya. Keempat, koordinasi aktivitas program dan proyek dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan memperkuat usaha pemulihan kehidupan sekitar 5,38 juta jiwa rakyat Aceh. Kelima, merancang berbagai aturan dan cara hidup baru pasca pandemi covid-19, dengan tata cara hidup kenormalan baru. Semua ini dapat

dilakukan dengan itikad baik dan kebijakan strategis melalui cara-cara yang bijaksana (Acehprov.go.id, 2020).

Pada masalah ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Dapat dipastikan ada usaha untuk mendapatkan dana serta anggaran oleh Pemerintah Aceh, sementara itu untuk berbagai kegiatan dan program membiayai aktivitas pemerintahan serta kerja-kerja rutin ada anggaran dana serta biayanya, Sebaiknya sejak awal dan harus memikirkan hal ini dengan melakukan koordinasi bersama Pemerintah Pusat, karena urusan kebijakan anggaran dan dana Aceh masih tetap berurusan serta bergantung kepada kebijakan Anggaran dan keuangan Pemerintah Pusat dengan status otonomi khusus, dengan demikian memikirkan pemulihan ekonomi Aceh dimasa transisi ini dapat dilakukan segera berpegang kepada prinsip memulihkan ekonomi rakyat terlebih dahulu, sehingga nantinya akan mendukung serta mendorong pembangunan Aceh, juga produksi, perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dampak ekonomi yang dirasakan langsung seperti peningkatan pengangguran, pemutusan hubungan kerja (PHK), naiknya angka kemiskinan Riil dan rentan miskin, dan berbagai dampak lainnya dapat diatasi segera saat ini sedikit demi sedikit. Ketika banyak yang meragukan koperasi bisa menjadi jalan keluar kesulitan ekonomi pada masa pandemi covid 19 ini, Bung Hatta sudah mengusulkan hal yang tajam terhadap badan usaha tersebut, beliau menyebutkan bahwa koperasi merupakan lawan dari kapitalisme secara fundamental. Koperasi merupakan badan usaha yang bisa dikembagkan di semua sektor baik itu sektor uang, perfabrikan, publik, bisnis hingga ke sektor perdagangan (Acehprov.go.id, 2020).

Program pemulihan ekonomi rakyat Aceh saat ini, jika berhasil dilakukan oleh Pemerintah Aceh, maka merupakan ujian riil terhadap kemampuan menyelesaikan persoalan serius yang dihadapi rakyat. Ini merupakan usaha sungguh-sungguh berhadapan dengan dampak kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang saat ini menjadi skala prioritas yang menjadi pemikiran pemerintah, pemimpin dan elite Aceh untuk menyongsong "new normal live" yang sudah merupakan kemestian yang harus dihadapi. Diperkirakan kuartal ke-4 akhir tahun 2020 ekonomi Aceh belum membaik, ini juga dipengaruhi kondisi makro ekonomi nasional yang tidak stabil, belum signifikan tumbuh normal sesuai target, sehingga mempengaruhi makro dan mikro ekonomi Aceh. Saat ini pertumbuhan ekonomi nasional menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 2,3%, dan masih bergerak menurun, sementara Aceh jauh lebih rendah dari nasional, karena tidak ditopang sektor industri, sektor ril, informal, jasa, kuliner, UMKM dan lainnya. Dikutip dari Antara News Aceh, Sebanyak 322 dari 340 koperasi yang tersebar di Kabupaten Aceh Barat dinyatakan tidak aktif akibat terdampak pandemi covid-19. Penyebab koperasi tidak aktif Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, selain akibat terdampak pandemi, banyaknya koperasi yang tidak aktif di daerah tersebut karena tidak adanya kepengurusan yang aktif. Kalau pun ada beberapa pengurus koperasi yang aktif, namun belum melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan sesuai dengan pembentukan koperasi. Bahkan, kata Zulyadi, sebagian besar koperasi di daerah ini belum pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta tidak pernah melaporkan kondisi keuangan koperasi kepada pemerintah daerah secara rutin. Untuk itu pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pengawasan secara

ketat sekaligus melakukan pendataan ulang, guna memastikan keaktifan koperasi di daerah ini. “Nanti kalau ada koperasi yang rutin melaporkan keuangan ke pemerintah daerah dan aktif, akan kita usulkan sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK) ke Kementerian Koperasi di Jakarta, sehingga nantinya koperasi tersebut betul-betul memiliki legalitas yang kuat,” kata Zulyadi menegaskan.

Nurhayati A.Md selaku anggota staf di bidang koperasi mengatakan bahwa pada tahun 2021 terdapat 338 koperasi. Dimana terdapat 230 koperasi aktif dan 108 koperasi tidak aktif hal ini juga disebabkan oleh adanya covid-19 yang mengakibatkan anggaran-anggaran yang dibutuhkan koperasi ada di Kabupaten Aceh Barat mengalami kemacetan dan susah untuk dicairkan karena anggaran pemerintah difokuskan untuk covid-19 serta kepengurusan yang tidak aktif adalah faktor utama yang mengakibatkan perkembangan koperasi Di Kabupaten Aceh Barat kurang mengalami perkembangan.

Setelah Penulis melakukan wawancara dengan Nurhayati A.Md selaku staf di Dinas Perdagangan di bidang koperasi maka penulis diterangkan bahwa Dinas Perdagangan telah melakukan pembinaan terhadap terhadap koperasi yang ada di kabupaten Aceh Barat, namun dalam pelaksanaannya masih juga terdapat koperasi-koperasi yang tidak aktif hal ini disebabkan oleh koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang mana jika suatu koperasi tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan dan melaporkan keuangannya selama 2 tahun maka koperasi tersebut dianggap tidak aktif, namun dari pihak Dinas Perdagangan memberi dispensasi 3 tahun lagi kepada koperasi untuk melakukan kan Rapat Anggota Tahunan dan melaporkan

keuangan koperasi, apabila dispensasi ini tidak ditindaklanjuti oleh koperasi maka koperasi tersebut dinyatakan tidak aktif hal ini disampaikan oleh Yulianda S.H selaku PKL di bidang koperasi.

Koperasi di Kabupaten Aceh Barat mengalami pasang surut dalam perkembangannya hal ini disebabkan oleh kurangnya tindak lanjut dari kedua belah pihak, yaitu Dinas Perdagangan di bidang koperasi dan dan koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Walaupun Dinas Perdagangan telah membina koperasi-koperasi di kabupaten Aceh Barat namun koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Aceh Barat, mereka mengatakan bahwa pihak PKL koperasi belum optimal dalam hal membina koperasi sehingga koperasi tersebut dapat dikembangkan. Hal ini merupakan suatu kelemahan yang dapat menghambat perkembangan koperasi di Kabupaten Aceh Barat sedangkan koperasi aktif yang ada di Kabupaten Aceh Barat mereka beranggapan bahwa pihak dari koperasi dari dinas perdagangan telah memberikan pembinaan bagi mereka dengan memberi pelatihan membuat laporan keuangan dengan baik, tetapi di balik semua itu banyak anggota koperasi yang belum paham dan tidak mengikuti sesuai prinsip-prinsip koperasi.

Sebelum Pandemi Covid-19 terdapat 90 koperasi yang aktif dan koperasi yang tidak aktif sebanyak 238 koperasi yang tidak aktif. Dinas Perdagangan memiliki peran penting dalam membina dan memberi penyuluhan terhadap koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Banyak koperasi di Kabupaten Aceh Barat tidak Aktif, dimana pasang surut dari perkembangan koperasi terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Pada umumnya perkembangan koperasi di Indonesia berjalan di

tempat. Pada masa pandemi covid 19 banyak masalah muncul yang mengakibatkan banyak sektor sektor terganggu, tidak luput pula pada sektor koperasi. Banyak Koperasi yang terdampak dari pandemi covid 19 ini. Berikut ini adalah tabel jumlah koperasi yang ada di Aceh Barat:

Tabel 1.1
Jumlah koperasi di Kabupaten Aceh Barat 2017-2021

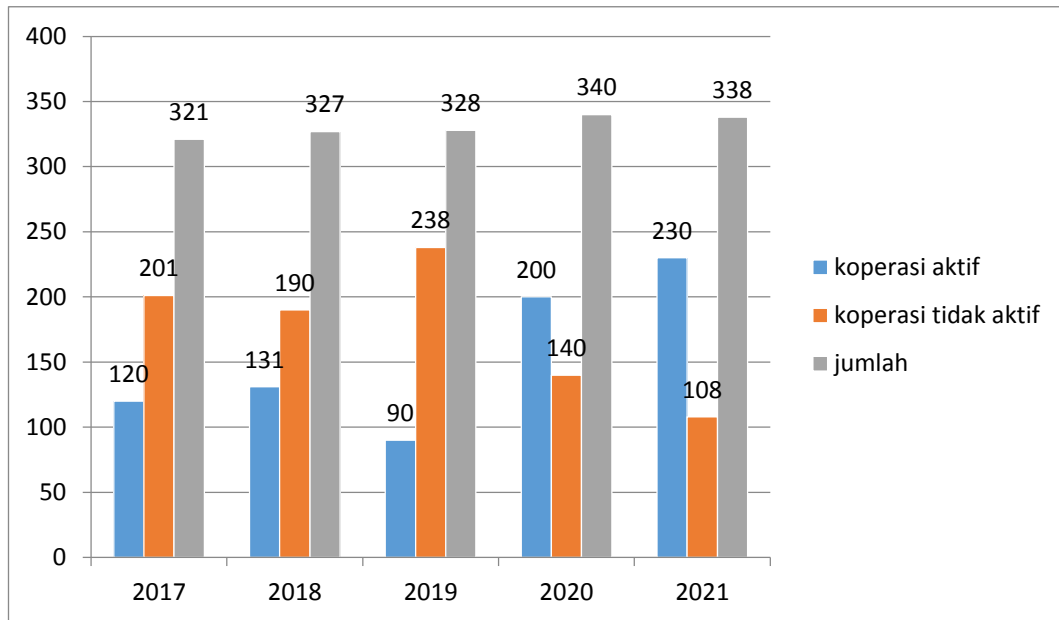
Tahun	Jumlah koperasi aktif	Jumla koperasi yang tidak aktif	Jumlah
2017	120 Unit Koperasi	201 Unit Koperasi	321 Unit Koperasi
2018	131 Unit Kopearsi	190 Unit Koperasi	327 Unit Koperasi
2019	90 Unit Koperasi	238 Unit Koperasi	328 Unit Koperasi
2020	200 Unit Koperasi	140 Unit Koperasi	340 Unit Koperasi
2021	230 Unit Koperasi	108 Unit Koperasi	338 Unit Koperasi

(Sumber Data: Dinas Perdagangan Aceh Barat Tahun 2021)

Berdasarkan tabel diatas kita dapat mengetahui bahwa pada tahun 2017 koperasi yang aktif lebih sedikit dari pada jumla koperasi yang tidak aktif dimana jumlah koperasi yang aktif dari jumlah kperasi 321 yang aktif hanya 120 unit koperasi yang aktif dan pada tahun 2018 koperasi yang aktif 131 unit koperasi dari 327 unit koperasi pada tahun 2019 koperasi yang aktif hanya 90 unit dari 328 unit koperasi. Selanjutnya pada tahun 2020 terdapat 200 unit koperasi aktif dan terdapat 140 koperasi yang tidak aktif jumlahnya yaitu 340 unit koperasi. Dan pada tahun 2021 terdapat 230 unit koperasi yang aktif dan terdapat 108 unit koperasi yang tidak aktif dengan jumlah unit koperasi pada tahun 2021 yaitu 338

unit koperasi. Berdasarkan uraian diatas maka kita dapat melihat grafik sebagai berikut:

Grafik 1.1
Jumlah Koperasi Pada Tahun 2017-2021 di Kabupaten Aceh Barat



(Sumber Dinas Perdagangan, Perkoperasian dan UMKM 2021)

Permasalahan yang ditimbulkan oleh covid-19 berdampak pada koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dinas perdagangan memiliki peran penting dalam perkembangan koperasi di Kabupaten Aceh Barat dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Analisis Perkembangan Koperasi Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Aceh Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, koperasi sangat berperan penting dalam hal perekonomian masyarakat. Namun terdapat berbagai masalah dan kendala yang dihadapi pada masa pandemi covid 19 ini dalam perkembangan koperasi di Aceh Barat. Dinas Perdagangan sangat penting dalam membantu dan membina

masyarakat dalam hal perkoperasian, jadi rumusan masalah ini ditetapkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan koperasi pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Aceh Barat?
2. Bagaimana permasalahan yang dihadapi koperasi di Kabupaten Aceh Barat pada masa covid 19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ialah:

1. Untuk mengetahui perkembangan koperasi pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada masa pandemi covid-19 koperasi di Kabupaten Aceh Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang koperasi serta dapat dijadikan sebagai sumber yang terkait dalam perkembangan koperasi.

1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis dapat memberikan referensi terhadap pelaksanaan dan pembinaan koperasi agar menjadi lebih baik lagi dikemudian hari.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian pada bab kesatu berisi Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Mamfaat Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar pemikiran penulis dalam menjawab permasalahan pada penulisan ini di antara lain adalah teori-teori koperasi definisi, koperasi langkah-langkah mendirikan koperasi, perkembangan koperasi Indonesia, penelitian terdahulu kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

Metode penelitian merupakan bab ketiga menjelaskan tentang Metode Penelitian Sumber Data Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penentuan Informan, Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data dan Uji Kredibilitas Data.

Pada bab keempat menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya terdapat Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Gambaran Umum Dinas Perdagangan, Hasil Penelitian, Pembahasan Dan Kendala Yang Menghambat Dinas Perdagangan Dalam Perkembangan Koperasi Pada Masa Pandemi Covid 19.

Pada bagian kelima berisi Kesimpulan dan Saran yang di dalamnya dijelaskan mengenai simpulan-simpulan yang diambil dari keseluruhan hasil penelitian serta saran-saran serta dalam ini dilengkapi dengan daftar pustaka yang penulis gunakan untuk melengkapi untuk menyusun skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori-Teori Koperasi

Pengertian koperasi ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu: pengertian umum dan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Pengertian secara umum koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan para anggotanya. Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Namun ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli. Salah satunya dari Bapak Koperasi, Mohammad Hatta. Menurutnya, koperasi adalah usaha bersama guna memperaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong. Sementara itu, Arifinal Chaniago mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengelolaan sebuah koperasi, para anggotanya dapat dengan bebas untuk keluar dan masuk dari badan usaha tersebut. Arti koperasi oleh Munkner adalah organisasi berasaskan tolong menolong yang mengelola urusan niagaan secara berkelompok. Tujuannya meningkatkan urusan ekonomi, berbeda dengan asas gotong royong yang bertujuan membangun kebutuhan sosial.

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Koperasi

berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial (Sitio, 2001.)

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Kartasapoetra, 1998).

Definisi koperasi menurut UU NO.25/1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

(Arifinal Chaniago, 2001) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya, Sehingga koperasi memungkinkan beberapa orang atau badan dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya.

Selanjutnya pengertian koperasi menurut Richard Kohl dan Abrahamson (Ropke, 2003:13) koperasi adalah sebagai “ badan usaha dengan kepemilikan dan pamakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan

terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu. Menurut Hendrojogi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Hendrojogi, 2007:21).

Beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan kumpulan individu yang saling membutuhkan modal bertujuan untuk mensejahterahkan anggota dan melaksanakan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam koperasi terdapat unsur kesukarelaan dan dengan bekerja sama serta menanamkan rasa kepercayaan manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan karena pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan - pertimbangan ekonomis.

(Hanel Sukamdiyo, 1996) mengemukakan bahwa organisasi koperasi merupakan suatu sistem sosial ekonomi. Maka agar dapat dipenuhi sebagai koperasi harus dipenuhi 4 kriteria berikut definisi nominalis:

- a. Kelompok koperasi adalah kelompok individu yang sekurang-kurangnya mempunyai kepentingan yang sama (tujuan yang sama).
- b. Swadaya kelompok koperasi adalah kelompok individu yang mewujudkan tujuannya melalui suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama.

- c. Perusahaan koperasi yaitu dalam melakukan kegiatan bersama, dibentuk suatu wadah yaitu perusahaan koperasi yang dimilikikan dikelola secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama.
- d. Promosi anggota perusahaan koperasi yang terdapat dalam organisasi tersebut, mempunyai tugas sebagai penunjang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.

Definisi (ILO, 1975) International Labor Organization merupakan salah satu organisasi yang memberikan perhatian terhadap masyarakat golongan bawah dalam definisinya terdapat 6 elemen yaitu:

- a. koperasi adalah perkumpulan
- b. Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan
- c. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai
- d. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan
- e. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuan lainnya, antara lain Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar, Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan

masyarakat yang adil dan makmur, Meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 25/1992, koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan sekunder.

1. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Perbedaan koperasi primer dan skunder yaitu Koperasi primer merupakan koperasi yang mempunyai anggota minimal sebanyak 20 orang, wilayah kerja koperasi primer meliputi satu lingkungan kerja, kelurahan, atau desa. Contohnya koperasi pegawai dan Koperasi Unit Desa (KUD). Sedangkan Koperasi sekunder merupakan koperasi yang dibentuk oleh koperasi-koperasi dan memiliki cakupan daerah kerja yang luas. Koperasi sekunder biasanya dibuat untuk efisiensi dan pemusatan. Cakupan wilayahnya dari kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional.

Sementara itu, UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) ada 4 jenis koperasi, yakni koperasi konsumen, koperasi produser, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Dalam Pasal 5 disebutkan, prinsip pelaksanaan koperasi, sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian.

2.2 Definisi Koperasi

koperasi merupakan kumpulan individu yang saling membutuhkan modal bertujuan untuk mensejahterahkan anggota dan melaksanakan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam koperasi terdapat unsur kesukarelaan dan dengan bekerja sama serta menanamkan rasa kepercayaan manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan karena pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Menurut undang-undang Nomor 25 tahun 1992 bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Undang-Undang, 1992). Moh Hatta “Bapak Koperasi Indonesia” mengatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’. Sedangkan menurut ILO (International Labour Organization) koperasi merupakan perkumpulan orang-orang, penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan, dan terdapat tujuan ekonomi yang ingin

dicapai, koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang. Munkner juga memberikan definisinya tentang koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan urusan niaga secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusan niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial yang dikandung gotong royong (Sityo, 2001).

2.3 Langkah-Langkah Mendirikan Koperasi

Ada beberapa langkah untuk mendirikan koperasi sebagai berikut:

1. Dasar pembentukan
 - a. Orang-orang yang ingin mendirikan koperasi dan orang yang akan menjadi anggota koperasi harus memiliki kegiatan atau kepentingan ekonomi yang sama. Tidak dapat mendirikan koperasi apabila tidak adanya kejelasan kegiatan atau kepentingan ekonominya.
 - b. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, yang bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha.
2. Persiapan untuk membentuk koperasi

Dalam pendirian koperasi harus adanya persiapan sebagai berikut :

- a. Orang-orang yang ingin mendirikan koperasi terlebih dahulu harus adanya penyuluhan oleh pejabat departemen koperasi, dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai maksud dan tujuan pendirian koperasi.

- b. Selanjutnya dilakukan juga pelatihan atau pendidikan terlebih dahulu bagi peminat yang ingin mendirikan koperasi tersebut.
- c. Setelah pelatihan atau pendidikan cukup pengertiannya selanjutnya dilandasi dengan keyakinan dan kesadaran mereka, tanpa adanya paksaan atau hanya ikut-ikutan saja, maka mereka dapat mengadakan rapat pembentukan.

3. Rapat Pembentukan

Persiapan pembentukan telah dilakukan, selanjutnya perlu diadakan rapat pembentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat dihadiri minimal 20 orang.
- b. Rapat ini dihadiri oleh pejabat dari instansi koperasi untuk memberi arahan.
- c. Dalam rapat ini membicarakan yang berkaitan dengan pembentukan koperasi.
- d. Penyusunan AD/ART koperasi selalu berpegang teguh pada ketentuan yang ada.
- e. Menyepakati keputusan mengenai pembentukan koperasi konsep AD/ART koperasi, modal awal, rencana kerja, serta pemilihan pengurus.

4. Pengajuan Permohonan untuk mendapatkan pengesahan hak badan hukum koperasi.

Langkah-langkah yang perlu untuk mendapatkan pengesahan badan hukum koperasi sebagai berikut :

- a. Para pendiri koperasi mengajukan permintaan pengesahan badan hukum kepada kepala kantor departemen koperasi di wilayah koperasi yang akan dibentuk.
- b. Permintaan pengesahan diajukan dengan lampiran seperti dua rangkap akte pendirian bermaterai, berita acara pembentukan, dan bukti penyetoran modal sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok.
- c. Pengurus harus telah menyediakan dan mengisi buku daftar Anggota dan buku Pengurus untuk bukti sahnya keanggotaan dan kepengurusan.
- d. Setelah menerima surat permohonan tersebut, maka pejabat koperasi setempat segera memberikan surat tanda penerimaan yang ditandatangani dan diberi tanggal kepada pendiri/pengurus koperasi yang bersangkutan.
- e. Perlu diperhatikan jika surat yang permohonan yang di ajukan tidak dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan, atau meskipun lampirannya lengkap akan tetapi tidak sempurna maka pejabat koperasi berhak untuk memberikan surat tanda penerimaan dan pengiriman kembali surat permohonan tersebut diajukan lagi setelah dilengkapi.

5. Pendaftaran koperasi sebagai badan hukum yang sah
 - a. Setelah surat tanda penerimaan diberikan kepada koperasi yang bersangkutan, pejabat koperasi harus wajib mengadakan penelitian dengan mengadakan pemeriksaan paling kurang dua bulan sejak tanggal penerimaan permohonan.
 - b. Pejabat koperasi menetapkan pendapatnya seperti meyetujui pembentukan koperasi agar koperasi tersebut mendapat hak badan hukum koperasi atau menunda ataupun menolak pembentukan dan pemberian badan hukum koperasi.
 - c. Jika telah memenuhi persyaratan pembentukan, pejabat menyatakan persetujuan dan meneruskan permohonan pengasahan badan hukum koperasi yang bersangkutan.
 - d. Kepala kantor departemen koperasi akan melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar, terutama mengenai keanggotaan, permodalan, kepengurusan dan bidang usaha yang akan dijalankan harus layak secara ekonomi.
 - e. Materi anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
6. Pengesahan Akte Pendirian

2.3.1 Perkembangan Koperasi Di Indonesia

Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20 . Pada umumnya sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Secara spontan mereka ingin merubah

hidupnya, di Indonesia ide-ide perkoperasian diperkenalkan oleh, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah Bank untuk para Pegawai Negeri. Karena semangat yang tinggi perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh De Wolff van Westerrode. Pada tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Dr Sutomo sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan-peraturan *Verordeningop de Cooperatieve Vereeniging* dan pada tahun 1927, *Regeling Inlandsche Cooperatiev.* Lalu, Pada tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam. Dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha-pengusaha pribumi.

Pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk penyebaran koperasi di Indonesia. Pada tahun 1942 negara Jepang menduduki Indonesia. Lalu Jepang mendirikan koperasi yang diberi nama koperasi *kumiyai*. Setelah bangsa Indonesia merdeka, lalu pada tanggal 12 Juli 1947 gerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Kongres Koperasi pertama menghasilkan beberapa keputusan:

1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia [SOKRI]
2. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
3. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi

Pada tanggal 12 Juli 1953, mengadakan kembali Kongres Koperasi yang ke-2 di Bandung. Kongres koperasi ke -2 mengambil putusan:

1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai pengganti SOKRI
2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
3. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
4. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru

Pelaksanaan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan:

1. Menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi
2. memperluas pendidikan dan penerangan koperasi
3. memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil.

2.3.2 Kondisi Koperasi di Indonesia Setelah Merdeka

Keinginan dan semangat untuk berkoperasi yang hancur akibat politik pada masa kolonial belanda dan dilanjutkan oleh sistem kumini pada zaman penjajahan Jepang, lambat laun setelah Indonesia merdeka kembali menghangat. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 33 yang menetapkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, maka kedudukan hukum koperasi di Indonesia benar-benar menjadi lebih mantap, sejak saat itu Moh.Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia lebih intensif mempertebal kesadaran untuk berkoperasi bagi bangsa Indonesia, serta memberikan banyak bimbingan dan motivasi kepada gerakan koperasi agar meningkatkan cara usaha dan cara kerja, atas jasa-jasa beliau lah maka Moh.Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

2.3.3 Koperasi di Indonesia pada Zaman Orde Baru Hingga Sekarang

Pada masa orde baru ini membuka peluang baru bagi pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di Indonesia, dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Ketetapan MPRS no.XXIII membebaskan gerakan koperasi dalam berkiprah. Berikut beberapa kejadian perkembangan koperasi di Indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang:

1. Pada tanggal 18 Desember 1967, Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang koperasi no.12 tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang no.14 tahun 1965.
2. Pada tahun 1969, disahkan Badan Hukum terhadap badan kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN).
3. Lalu pada tanggal 9 Februari 1970, dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
4. Dan pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan Undang-Undang no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di masa yang akan datang.
5. Masuk tahun 2000 hingga sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat

Menurut sumber informasi dari (Pikiran Rakyat Meulaboeh, 2020), Sebanyak 322 dari 340 koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh hingga kini dinyatakan tidak aktif akibat terdampak Covid 19. Dari 340 koperasi hanya 15 sampai 18 koperasi saja yang aktif. Selebihnya 322 koperasi

tidak aktif, hal ini disampaikan Oleh kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Aceh Barat, Zulyadi di Meulaboeh. Menurutnya, berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, selain akibat dari pandemi, banyaknya koperasi yang tidak aktif juga dipicu oleh tidak adanya kepengurusan yang aktif dan jika ada kepengurusan yang aktif namun sejauh ini belum melakukan melakukan usaha atau melakukan kegiatan yang sesuai dengan pembentukan koperasi, kata Zulyadi, Bahkan sebagian besar koperasi di Kabupaten Aceh Barat belum pernah melakukan Kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta tak pernah melaporkan kondisi keuangan koperasikepada pemerintah daerah secara rutin. Dan sementara itu di kutip dari Meulaboh (Antaraneews, 2020) Sebanyak 322 dari 340 koperasi yang tersebar di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh hingga kini dinyatakan tidak aktif akibat terdampak pandemi covid 19. “Dari 340 koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat, saat ini hanya ada sekitar 15 sampai 18 koperasi saja yang aktif, selebihnya 322 koperasi tidak aktif,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Barat Zulyadi di Meulaboh, Senin. Menurutnya, berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, selain akibat terdampak pandemi, banyaknya koperasi yang tidak aktif di daerah tersebut diduga dipicu karena tidak adanya kepengurusan yang aktif, kalau pun ada beberapa pengurus koperasi yang aktif, katanya, namun sejauh ini belum melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan sesuai dengan pembentukan koperasi. Bahkan, kata Zulyadi, sebagian besar koperasi di daerah ini belum pernah melakukan rapat anggota tahunan (RAT). Serta tidak pernah melaporkan kondisi keuangan koperasi kepada pemerintah daerah secara rutin. Agar persoalan banyaknya koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Aceh Barat, pihaknya dalam

waktu dekat berencana melakukan pengawasan secara ketat, sekaligus melakukan pendataan ulang guna memastikan keaktifan koperasi di daerah ini. “Nanti kalau ada koperasi yang rutin melaporkan keuangan ke pemerintah daerah dan aktif, akan kita usulkan sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK) ke Kementerian Koperasi di Jakarta, sehingga nantinya koperasi tersebut betul-betul memiliki legalitas yang kuat”.

2.4 Penelitian Terdahulu					
No	Nama	Judul	Metode penelitian	Variabel	Hasil
1	Sriati, 2020	Analisis kinerja pengurus dan hubungan dengan partipasi anggota koperasi di kecamatan Tanjung Logo kabupaten Banyuasin.	Kuantitatif deskriptif	Variabel dependen: Kinerja. Variabel independen: Partisipasi anggota koperasi.	Jumlah anggota yang diambil sebagai responden sebanyak 33 orang sedangkan dari koperasi BMT Trans Damai Mandiri yang memiliki anggota sebanyak 334 anggota diambil sebanyak 10 orang Umur responden mulai dari 20 tahun sampai 54 tahun dengan pengalaman berkoperasi antara 1 tahun sampai 10 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 indikator kinerja pengurus koperasi 4 diantaranya termasuk kriteria sedang, dan hanya satu yang termasuk kriteria tinggi, yaitu indikator kepuasan anggota.
2	Khairinal, 2020	Pengaruh Kualitas Pelayanan koperasi dan perkembangan usaha koperasi terhadap partisipasi anggota koperasi Berkah karya mandiri prim yang kota Jambi.	Penelitian kuantitatif deskriptif	Variabel dependen: Pengaruh kualiatas pelayanan. Variabel independen: Partisipasi anggota koperasi.	Untuk variable kualitas pelayanan koperasi diperoleh nilai maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.
3	Fauzi, 2019	Strategi bahagia koperasi atas maraknnya finansial teknologi.	menganalisis dengan menggunakan matriks IFE dan	Variabel dependen: Strategi Bahagia. Variabel independen:	Strategi bahagia pada koperasi bahagia ini merupakan cerminan dari Visi Koperasi bahagiasendiri yaitu terwujudnya koperasi yang

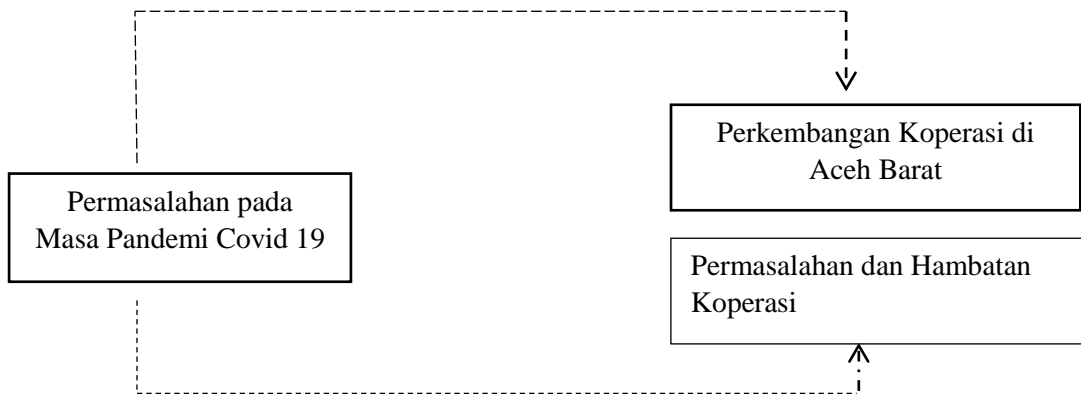
			matriks EFEdan maka proses, elanjutnya dilakukan analisis tahap pencocokan	Finansial teknologi	amanah dan berkualitas demi kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.
4	Manarung, 2019	Pemamfaatan aplikasi custumer relation managemenn pada koperasi.	Model regreasi linear.	Variabel dependen: Pemamfaatan aplikasi. Variabel independen : sistem mangemankoperasi	Menunjukkan tampilan flowchart terhadap sistem yang akan dibangun dari pemamfaatann aplikasi
5	Mudhofar, 2020	pengembangan usaha primer koperasi produsen tahu tempe di Jakarta selatan.	Kualitatif yang dikuantatikan	Variable dependen: strategi. Varabel independen: lingkunggn internal PRIMKOPTI Jakarta selatan.	hasil Analisis lingkungan internal PRIMKOPTI Jakarta selatan mengacupada analisis lingkungan internal David (2016) dapat di identifikasi analisis lingkungn internal PRIMKOPTI Jakarta Selatan berupa akte yang terdiri dari Managemen,pemasaran,keuangan<produksi dan operasi,penelitian pengembangan dn sistem koperasi.
6	Sitepu, 2018	Perkembangan ekonomi koperasi Indoonesia	Kualitatif deskriptif	Variabel dependen: perkembangan kopearasi Variabel indenpenden :	Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia. Karena sifat masyarakatnya yang kekeluargaan dan kegotongroyongan, sifat inilah yang sesuai dengan azas koperasi saat

				Persentase jumlah koperasi	ini. Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia.
7	Mulyono, 2010	Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat Indonesia.	Metode deskriptif analitis	Variable dependen: mengembangkan koperasi. Variabel independen: Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Indonesia	Koperasi merupakan solusi untuk mengembangkan ekonomi Indoonesia dimana koperasi ini dapat menunjang perekonomian,khususnya anggota koperasi itu sendiri.
8	Setiaji,2009	Pengaruh Partisipasi Anggota dan Lingkungan Usaha Terhadap Keberhasilan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kapas Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara).	analisa deskriptif dan analisis regresi berganda.	Variable depende: Pengaruh anggota dan lingkungan. Variabel independen : keberhasilan dan signifikasi koperasi	Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa ada pengaruh signifikan dari partisipasi anggota terhadap keberhasilan koperasi dan lingkungan usaha terhadap keberhasilan secara parsial dan Ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggota terhadap keberhasilan KPRI Kapas dan ada pengaruh signifikan antara lingkungan usaha terhadap keberhasilan KPRI Kapas serta ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggota

					dan lingkungan usaha terhadap keberhasilan KPRI Kapas Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.
--	--	--	--	--	---

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan tentang perkembangan koperasi di Kabupaten Aceh Barat serta permasalahan, dimana perkembangan koperasi di Aceh barat mengalami kenaikan dan penurunan serta koperasi aktif dan tidak aktif yang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pada masa pandemi covid 19 juga banyak mengakibatkan efek yang menimbulkan permasalahan ekonomi tak luput juga dibidang koperasi juga mengalami dampak yang serius pada masa covid 19 ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Penulis berusaha menjelaskan suatu kejadian sesuai dengan kenyataan. Menurut (Maleong, 1990) Metode Kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti, Pernyataan ini dikutip pada buku Metodologi Penelitian Kualitatif Herdiansyah Haris pada tahun 2010. Pada metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu (Bugin, 2013).

3.1.1 Populasi dan Sampel Data

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010:117). Populasi dalam penelitian ini adalah 338 unit koperasi di Kabupaten Aceh Barat.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti (Arikunto, 2010:109). Pengambilan sampel untuk penelitian menurut (Arikunto 2010:12), jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil

semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Koperasi di Kabupaten Aceh Barat terdapat 338 koperasi disini peneliti mengambil 10% dari populasi yang akan diteliti maka sampel penelitian yang diteliti yaitu 34 koperasi.

3.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. (Bugin, 2013:129). Dalam penelitian ini Observasi, Wawancara, kuesioner itu termasuk ke sumber data primer.
2. Data sekunder merupakan data kedua sesudah data primer. Data sekunder dalam penelitian ini dapat ditemukan data dari perpustakaan, berita dan internet.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan manusia dengan menggunakan mata untuk bantuan utamanya. pengumpulan data yang telah diamati tersebut kemudian dihimpun menjadi data penelitian (Bungin, 2013:143). Adapun penelitian ini peneliti melihat objek secara langsung, Observasi dalam rencana penelitian ini adalah Dinas Perdagangan di Kabupaten Aceh Barat dan koperasi-koperasi di Kabupaten Aceh Barat.

2. Wawancara

Wawancara ialah metode yang dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara yang mewawancarai dengan yang di wawancara (Bungin, 2013). Adapun wawancara yang dilakukan ialah untuk mengetahui Perkembangan koperasi pasa masa pandemic covid 19 di kabupaten Aceh Barat.

3. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2005:162).

3.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini memilih pihak-pihak yang berpengaruh dalam masalah penelitian dan orang-orang yang bisa didapat kunci informasi.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menganalisa, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi Dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang terjadi di lapangan (Winarta,2006:155). Dan yang menjadi instrumen penulis ialah penulis sendiri yang mengolah seluruh proses penelitian dari awal dan akhir penelitian dengan menggunakan wawancara kuesioner dan serta berpodoman pada pertanyaan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data (Maleong, 2003). Analisis data yaitu cara mudah untuk mendapatkan data menjadi informasi sehingga data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan dalam sebuah penelitian.

3.7 Lokasi Penelitian

Tempat penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Barat yang bertempat jalan Sisingamangaraja Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan serta koperasi 34 unit Koperasi di Kabupaten Aceh Barat.

3.8 Definisi Operasional Variabel

Agar tidak menimbulkan pengertian ganda tentang variable-variabel utama pada penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan definisi masing-masing variable sebagai berikut:

- a. Perkembangan koperasi adalah hal yang diteleti oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat selama pandemi covid 19.
- b. Pandemi covid 19 adalah wabah penyakit yaitu Corona Disease 2019 (COVID-19) dimana setiap orang dapat berpotensi terinfeksi dari virus tersebut, dan dalam hal ini kegiatan ekonomi terganggu, khususnya kegiatan koperasi di Kabupaten Aceh Barat.

BAB IV

HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Geografis Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat dengan ibukotanya Meulaboh, sebelum pemekaran mempunyai luas wilayah 10.097.04 Km² atau 1.010.466 Ha dan secara astronomi terletak pada 2° - 5°,16 Lintang Utara dan 95° 10° Bujur Timur dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatra yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki gunung gerute perbatasan dengan Aceh Besar sampai kesisi Krueng Seumayam perbatasan dengan Aceh Selatan dengan panjang garis pantai sejauh 250 Km.

Setelah terjadi pemekaran, letak kabupaten Aceh Barat secara agronomi terletak pada 04° - 6° - 04° 47 Lintang utara dan 95° - 86° Bujur Timur dengan luas wilayah 2.442,00 Km² Bujur sangkar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya

Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan
Raya

Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Wilayah Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 kecamatan, 32 Mukim dan 322 Gampong.

4.2 Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat

Dinas perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat terbentuk berdasarkan pada Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat.

Visi Dinas Perdagangan koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Barat sebagai unsur pelaksana program dan kegiatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta teknis Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat melalui Sekretaris Daerah, maka visi Dinas Perdagangan, koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Barat adalah: “Terwujudnya pertumbuhan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Peran Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan.” Visi ini bertujuan untuk menetapkan penataan pelaksanaan pembangunan dibidang koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten Aceh Barat. Dalam visi Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat tahun 2019-2021 kata-kata mengandung makna bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah yang tanggung dan mandiri dibidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan berkeadilan di Kabupaten Aceh Barat.

4.3 Hasil Penelitian

Setelah dilakukannya penelitian dilapangan, penulis dapat menyimpulkan bagaimana perkembangan koperasi pada masa covid 19 di Kabupaten Aceh Barat. Dengan hasil peneltian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jenis dan koperasi aktif dan koperasi tidak aktif

Jenis koperasi	Koperasi aktif (Unit)	Koperasi tidak aktif (Unit)	Jumlah (Unit)
Koperasi Unit Desa	12	1	13
Koperasi Pegawai Negeri	31	15	46
Koperasi Simpan Pinjam	16	0	16
Koperasi KOPONTREN	8	6	14
Koperasi Karyawan	3	6	9
Koperasi Serba Usaha	53	22	75
Koperasi Wanita	19	2	21
Koperasi TNI/POLRI	5	1	6
Koperasi Pedagang Pasar	2	1	3
Koperasi Pertanian	12	20	32
Perkebunan/Kehutanan	24	10	34
Koperasi Perikanan	12	7	19
Koperasi Peternakan	1	4	5
Koperasi Pemuda	1	1	2
Koperasi Angkutan	1	0	1
Koperasi Pensiunan	2	0	2
Koperasi Industri	5	6	11
Koperasi Jasa	5	0	5
Koperasi Produsen	15	0	15
Koperasi Konsumen	3	6	9
Jumlah	230	108	338

(Sumber data: Dinas Perdagangan, koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Barat 2021)

Tabel diatas menyatakan bahwa terdapat 20 jenis koperasi di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi covid 19 ini di tahun 2021 terdapat 230 koperasi yang aktif dan 108 koperasi yang tidak aktif, Jumlah keseluruhan koperasi yaitu 338 unit koperasi.

Nurhayati A.Md selaku Staf dari Dinas Perdagangan mengatakan bahwa: Pada masa pandemi covid 19 ini banyak koperasi yang terpengaruhi oleh covid 19 ini, hal ini diakibatkan oleh banyaknya kendala yang ditempuh, Namun kendala yang sangat berpengaruh yaitu kepengurusan yang tidak aktif serta bantuan keuangan yang susah dicairkan karena pemerintah memfokuskan pada kasus covid 19. Selanjutnya Rapat Anggota Tahunan (RAT) berkurang karena akibat dari akibat pandemi covid 19 ini yang mengharuskan mereka mempersiapkan protokol kesehatan. Peran Dinas Perdagangan pada koperasi pada masa pandemi covid 19 ini pihak Dinas Perdagangan melakukan Pengawasan, Pembinaan dan Penilaian.

Bapak Junaidi selaku Staf dari Dinas Perdagangan mengatakan bahwa “Dalam melakukan pembinaan koperasi kami memiliki 3 aspek, pertama kelambagaannya, usahanya, dan keuangannya. Kami juga melakukan penyuluhan terhadap koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dan membina anggota koperasi untuk membuat laporan keuangan. Kami mengunjungi kelapangan setahun sekali itu untuk memeriksa RAT. Dan juga untuk memberi pelatihan kepada koperasi.

Yulianti S.H menjekaskan bahwa koperasi di Kabupaten di Aceh Barat ada yang mengalami Perkembangan dan ada juga yang tidak mengalami perkembangan hal ini juga disebabkan oleh banyak hal tertentu yang menghambat jalannya kegiatan koperasi, pada masa pandemi ini faktor utama yang menghambat adalah faktor koperasi yang tidak ada kepengurusan yang aktif, serta keuangan mengalami kemacetan sehingga sulit untuk dicairkan dan anggaran pemerintah difokuskan pada kasus covid 19.

Sinta Mutia Menjelaskan bahwa Koperasi di Kabupaten Aceh Barat tentunya mengalami kemunduran pada masa pandemi ini karena kegiatan ekonomi mengalami gangguan, Namun pada masa pandemi ini kami juga melakukan pengawasan pada koperasi di kabupaten Aceh Barat. Kendala kami saat mendatangi koperasi yaitu anggota koperasi dan pengurusnya tidak ada pada saat di kunjungi oleh pihak kami.

4.3.1 Perkembangan Koperasi Pada Masa Pandemi Covid 19

Perkembangan koperasi di Kabupaten Aceh Barat Setelah adanya pandemi covid 19, Bapak Zulyadi, S.E, Ak selaku kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat menjelaskan terdapat 322 koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Aceh Barat yang diakibatkan dari pandemi covid 19 pada tahun 2020. Dari koperasi 340 yang aktif hanya 15 sampai 18 koperasi yang aktif. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, selain akibat terdampak pandemi, banyaknya koperasi yang tidak aktif di daerah tersebut karena tidak adanya kepengurusan yang aktif, Kalau pun ada beberapa pengurus koperasi yang aktif, namun belum melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan sesuai dengan pembentukan koperasi, bahkan sebagian besar koperasi di daerah ini belum pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta tidak pernah melaporkan kondisi keuangan koperasi kepada pemerintah daerah secara rutin, untuk itu pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pengawasan secara ketat sekaligus melakukan pendataan ulang, guna memastikan keaktifan koperasi di daerah ini. “Nanti jika ada koperasi yang rutin melaporkan keuangan ke pemerintah daerah dan aktif, akan kita usulkan sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK) ke

Kementerian Koperasi di Jakarta, sehingga nantinya koperasi tersebut betul-betul memiliki legalitas yang kuat.

Selanjutnya Nurhyati A.Md menjelaskan Menjelaskan bahwa pada tahun 2021 terdapat 338 Koperasi di Aceh Barat namun hanya 230 koperasi yang aktif dan 108 unit koperasi yang tidak aktif. Dinas perdagangan dalam masa pandemi covid 19 ini melakukan 3 hal dalam perkembangan koperasi di Kabupaten Aceh Barat:

1. pengawasan

Pengawasan yaitu Dinas Perdagangan melakukan pengawasan kepada Koperasi-koperasi yang ada di Aceh Barat agar koperasi tersebut melakukan hal-hal yang sesuai dengan tujuan berdiri dari koperasi tersebut.

2. pembinaan

Pembinaan pihak dari Dinas Perdagangan melakukan penyuluhan dan membina Koperasi koperasi yang ada di Aceh Barat agar selalu aktif dan melakukan rapat anggota tahunan yang merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap koperasi.

3. Penilaian

Penilaian yaitu jika Koperasi di Aceh Barat tidak melakukan rapat anggota tahunan dan tidak melaporkan melaporkan selama 2 tahun maka koperasi tersebut dianggap tidak aktif namun dari pihak dinas perdagangan memberikan dispensasi selama 3 tahun kepada pihak koperasi untuk

melakukan rapat tahunan namun jika tidak ada rapat tahunan maka koperasi tersebut dinyatakan tidak aktif dan keseluruhan dispensasi adalah 5 tahun.

Berikut adalah hasil penelitian beberapa koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat:

1. Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Serambi Aceh, setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pernyataan dari Tgk Razi selaku dewan guru di pesantren tersebut mengatakan bahwa bangunan Koperasi di pondok pesantren tersebut sudah tidak ada di Serambi Aceh Desa Meunasah Rayeuk. Namun bangunannya berada di jalan singgah mata yaitu jalan terminal Meulaboh, setelah peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak Rusdian selaku anggota koperasi mereka mengatakan bahwa Koperasi ini memang dinyatakan koperasi aktif tetapi sekarang ketua dan pengurusnya sudah tidak tahu kemana lagi, serta kami tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah. memang bangunan kami ini pertamanya berasal dari koperasi namun modal yang kami keluarkan sudah merupakan modal kami sendiri.
2. Koperasi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Teuku Umar (UTU), Bapak Isyaldi selaku pengurus aktif koperasi Simpan Pinjam ini mengatakan bahwa Koperasi simpan pinjam di FKM ini memang aktif dan berjalan, dalam pelaksanaannya kami rutin melakukan Rapat Anggota Tahunan serta kami melaporkan keuangan setiap tahun, tapi pada masa pandemi covid 19 ini kami tidak menerima bantuan dari pihak dinas

perdagangan mau dari pemerintah hal ini mungkin dari pihak kami belum membuat surat permohonan saja, Sejauh ini belum ada kendala dalam perkoperasian kami ini karena setiap orang yang mengambil dana simpan pinjam gaji dari anggota langsung dipotong, hal inilah yang membuat koperasi ini tetap berjalan.

3. Bapak T.Khairul Anwar selaku Anggota Koperasi aktif di Desa Pinem Kecamatan Samatiga menjelaskan bahwa “pembinaan yang dilakukan selama ini baik cuma itulah orang Dinas tidak turun kelapangan, setahu saya terakhir orang pembinaan itu datang pada tahun 2017, dan sampai sekarang tidak datang lagi yang dari Dinas itu dan kantor koperasi yang ada ditempat kami sudah tidak aktif dan menjadi gudang sekarang, dulu memang ada kedai koperasi.”
4. Menurut Bapak Fikar selaku koperasi aktif Koperasi di desa Teupin Peuraho Kecamatan Arongan Lambalek menjelaskan bahwa “koperasi kami sudah lama tidak aktif memang sudah mati. Tetapi baru-baru ini saya mendengar mau diaktifkan kembali. Tapi sampai hari ini belum ada kabar. Saya berharap jika nanti koperasi ini aktif kembali dari pegawai lebih fokus membina usaha saja. Jangan kesini hana memeriksa buku laporan saja”.

Menurut Bapak saidi selaku Pengurus Koperasi aktif di Arongan Lambalek menjelaskan “saya sudah lama sekali bergabung di koperasi Koperasi ini, memang sekarang koperasi ini tidak aktif, namun baru baru ini pegawai dari Dinas Perdagangan kembali kelapangan untuk melihat kondisi Koperasi ini. Dari pihak saya sendiri ingin mengaktifkan kembali

koperasi ini, dengan pergantian pengurus baru dan anggota baru. dan juga pegawai Dinas Perdagangan harus betul-betul dan membina serta mengarahkan bagaimana cara menjalankan usaha yang baik dan berkembang. Dengan jalannya usaha atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan, Maka koperasi ini terus aktif.

5. Pesantren Darussalamah Desa Alue Tampak selaku Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) yang aktif di Kabupaten Aceh Barat.

Tgk Taufiq. Spd selaku dewan guru pesantren darussalamah Desa Alue Tampak mengatakan bahwa Koperasi di sini sudah lama tidak aktif, pengurus dan anggotanya sudah tidak tahu lagi di mana keberadannya karena memang sudah mati namun dari pihak Dinas Perdagangan masih menganggap kami ini aktif karena belum masuk Tempo jangka dispensasi yaitu 5 tahun. Koperasi ini tidak mengalami perkembangan makanya tidak ada lagi pengurus dan anggotanya, dulu memang ada toko kopperasi di depan Masjid desa Alue Tampak sekarang tidak lagi beroperasi.

6. Koperasi Sempurna Desa Kede Aron, Menurut Bapak Faisal selaku pengurus Koperasi Tidak Aktif di Kede Aron kecamatan Kaway XVI menjelaskan bahwa “Saya dulu pengurus koperasi unit Desa, sudah lama sekali. Setahu saya dulu PKL memberi pembinaan seperti membuat laporan, sekarang koperasi kami sudah mati, dan tidak ada masyarakat yang bernisiatif untuk mengaktifkannya kembali. Karena selama ini pengurus saja yang mengelolanya, karena itu mungkin tidak aktif lagi. Selama pembinaan pegawai datang secara rutin setahun sekali untuk

memeriksa RAT, dan pada masa pandemi ini kami tidak menerima bantuan.

Menurut ibu Mirdayati selaku Anggota koperasi tidak aktif di Kede Aron Kecamatan Kaway XVI menjelaskan bahwa “Saya anggota koperasi yang sudah lama tidak aktif, tentang pembinaan saya kurang tahu karna sudah lama, setahu saya ada dibuat pertemuan waktu pertama kali pembentukan koperasi kami ini oleh pegawai Dinas Perdagangan disitu mereka menjelaskan mengenai bagaimana pembentukan koperasi dan mereka akan membina dalam membangun usaha atau keperluan masyarakat lainnya, koperasi ini tidak berkembang dan sekarang koperasinya sudah tidak aktif.”

7. Koperasi Saweu Sabee Desa Keude tanjong kecamatan Kaway XVI, Menurut ibu Merisawati anggota koperasi yang aktif beliau mengatakan bahwa: koperasi ini merupakan koperasi simpan pinjam, Dulu memang betul adanya koperasi disini tapi sekarang koperasi ini sudah tidak ada kegiatan lagi, pengurus dan anggotanya sudak tidak mengurus lagi koperasi ini, kalau segi bantuan oleh pemerintah, koperasi ini berjalan saja tidak bagaimana mau mendapat bantuan, Koperasi ini tidak berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan.
8. Koperasi Mekar Abadi Desa Bereugang merupakan salah koperasi aktif yang ada di Kabupaten Aceh Barat, Ibu Ratna sebagai pengurus koperasi aktif mengakatakan bahwa tidak adanya perkembangan pada koperasi kami, hal ini diakibatkan kepengurusan yang tidak aktif dan anggotanya pun sudah tak tahu kemana lagi, Apa lagi Selama covid 19 PKL koperasi

pun tak pernah datang lagi ke sini, dulu memang ada memberi pelatihan tetapi sekarang tidak lagi.

9. Koperasi Cahaya Permata PT. PLN cabang Meulaboh yang merupakan koperasi karyawan yang aktif di kabupaten Aceh Barat. Bapak Andi selaku anggota dari koperasi cahaya permata PLN cabang Meulaboh mengatakan bahwa memang benar adanya koperasi karyawan di PLN cabang Meulaboh, para karyawan yang merupakan anggota koperasi sangat disiplin saat mengembalikan uang dari simpan pinjam koperasi yang ada di koperasi cahaya permata ini, tidak ada hambatannya karena setiap anggota yang mengambil uang pinjaman dari koperasi maka uang mereka akan dipotong dari gaji mereka. Sejauh ini koperasi cahaya permata tidak mendapat bantuan dari pemerintah karena koperasi tersebut belum mengajukan permohonan pada pemerintah atau pihak yang bersangkutan.
10. Koperasi Tani pereumeu baru yang merupakan koperasi yang bergerak di bidang Pertanian, Keterangan dari kaur Pembangunan desa Keude Aron bahwasanya koperas ini tidak aktif Karena tidak adanya kepengurusan yang aktif, Anggota dan pengurusnya sudak tidak mengurus lagi, Memaang dalam data masih ada Koperasi ini namun tidak aktif lagi.
11. Koperasi Masana Desa Cot trueng meunasah Rambot, Bapak Jamaluddin menginformasikan bahwa koperasi ini sudah tidak lagi sejak tahun 2017, Kepengurusan yang tidak aktif yang menjadi faktor utama yang menjadi penyebab tidak aktifnya koperasi ini.

12. Koperasi Kopesmak Kapolsek Peureumeu Kaway XVI yang merupakan koperasi aktif, Valerian mengatakan bahwa “pada tahun 2021 sejauh ini koperasi ini tidak berjalan, ketidakberjalanannya ini dipicu tidak adanya kepengurusan yang aktif, mungkin pengurus dan anggota ada kegiatan lain jadi tidak sempat mengurus koperasi”.
13. Koperasi Industri perkelapaan Desa Keude Aron Irwan Safrizal selaku perangkat Gampong Desa Keude Aron mengatakan bahwa memang benar ada Koperasi perkelapaan di desa ini namun sudah tidak aktif lagi karena anggota dan pengurusnya sudah tidak mengurus lagi koperasi ini.
14. Koperasi SMP Negeri 3 Meulaboh, Ichwani Spd. selaku anggota koperasi mengatakan bahwa memang benar adanya koperasi di SMPN 3 yaitu koperasi Bintra, koperasi ini merupakan koperasi karyawan yang dalam kegiatannya menjalankan simpan pinjam yang dikelola oleh guru-guru dimana pengurusnya adalah ibu Dra Marlina K. Koperasi ini merupakan koperasi yang baru diaktifkan kembali setelah beberapa saat tidak menjalankan kegiatannya, sejauh ini koperasi ini sudah berjalan dan sejauh ini belum ada kendala karena memang baru berjalan "Tegas ibu Ichwani Spd", dari segi bantuan, koperasi ini baru saja diaktifkan kembali jadi pihak koperasi belum mengajukan permohonan kepada pemerintah dalam hal bantuan.
15. Koperasi Peumakmu nanggro Desa Meutulang yang merupakan koperasi perkebunan dan kehutanan Bapak Zulkarnaini selaku perangkat desa Meutulang mengatakan bahwa memang benar di kampung ini ada Koperasi bahkan ada dua koperasi di Desa Meutulang yaitu koperasi

Pemakmu Nanggroe dan dan koperasi Pantan Rhee Raya Koperasi ini sudah lama tidak aktif pengurusnya dan anggotanyapun sudah tidak kemana lagi ya memang tidak aktif lagi, dulu memang benar adanya koperasi disini.

16. Koperasi Amanah Desa Tanjong yang bergerak dibidang koperasi serba usaha, Merisawati selaku Perangkat gamoeng mengatakan bahwa memang benar adanya mkoperasi tersebut disini, datanya memang masih aktif tetapi koperasi ini sudah tidak berjalan lagi karena kepengurusan yang tidak aktif baik pengurus maupun anggotanya.

17. Koperasi Rimba bentara Desa Teupin panah yang bergerak di bidang perkebunan dan kehutanan. Bapak Zainal mengatakan bahwa koperasi ini memang koperasi aktif namun sekarang anggota koperasi dan pengurusnya sudah tidak menjalankan lagi koperasi, ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan koperasi ini tidak aktif baik itu anggota sudah sibuk kerja di PT. Betami dan faktor lain sebagainya.

18. Koperasi Pratama Jaya Padang Sikabu, Bapak Ari selaku pengurus koperasi mengatakan bahwa koperasi ini merupakan koperasi aktif masih berjalan, Perkebunan kelapa sawit merupakan faktor utama yang mendukung koperasi ini terus berjalan. Pada masa covid 19 sejauh ini belum ada kendala karena memang koperasi bergerak di bidang perkebunan hanya saja pada penyediaan pupuk saja yang susah pada masa ppanдеми ini, dari bantuan kami belum mengajukan permohonan saja pada instansi yang terkait

Nurhayati A.Md selaku staf di bidang koperasi menerangkan bahwa:

1. Koperasi Sumber Makmur Desa Sumber Batu Kecamatan Meureubo
2. .Koperasi Tunas Baru Desa Alu Keumuning Kecamatan Woyla Barat
3. Koperasi Bahagia Desa Kuala Bhee Kecamatan Woyla
4. Koperasi Maju Jaya Desa Gunung Pulo Kecamatan Arongan Lambalek
5. Koperasi Karya Makmur Desa Sumber Batu Kecamatan Meureubo
6. Koperasi Woyla Desa Kuala Bhee Kecamatan Woyla
7. Koperasi Karya Abadi Kecamatan Sama Tiga

Koperasi tersebut merupakan koperasi tidak aktif karena tidak adanya kepengurusan yang aktif, hal itu dikarena pengurus dan anggotanya tidak berkeingin atau berkemauan untuk menjalankan perkoperasian itu sendiri.

1. Koperasi BRI Cabang Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan
2. Koperasi Koguya SMK 2 Meulaboh Johan Pahlawan
3. Koperasi Kogupja SMP 3 Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan
4. Koperasi Kospin Kantor Perindag Kecamatan Johan Pahlawan
5. Kopenak Kantor Kodisnak Johan Pahlawan
6. Koperasi Kokorisma Meulaboeh Johan Pahlawan
7. Koperasi Kokarta Kantor Distan Meulaboh Johan Pahlawan
8. Koperasi Cahaya Permata PT. PLN cab. Meulaboeh Johan Pahlawan
9. Koperasi Primkopda GS Yon 116 Meureubo
10. Kopesmak Kantor Kapolsek Kaway XVI
11. Koperasi BRI Kantor BRI Cabang Meulaboh Johan Pahlawan
12. Koperasi POS PT Pos Meulaboh Johan Pahlawan
13. Bumo Aceh Desa Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan
14. Saudara Desa Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo

15. Koperasi Beusapeu Pakat Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan
16. Kop. Jasa Bersama PPOB Jln. Swadaya Johan Pahlawan
17. Kop.Simpan Pinjam FKM UTU Meureubo
18. Koperasi Babul Rizki Desa Kecamatan Meureubo

Koperasi di atas merupakan koperasi aktif dimana koperasi tersebut melakukan Rapat Anggota tahunan dan melaporkan keuangan secara rutin.

Yulianti S.H selaku Operator di bidang Koperasi mengatakan bahwa “Koperasi yang aktif dan berkembang rata-rata berada di Kecamatan Johan Pahlawan, Karena Koperasi di Kecamatan Johan Pahlawan Rutin Melaporkan Keuangan serta Akses mereka ke Kantor Dinas Perdagangan pun dekat dan dari pada itu informasi yang ada pun mereka cepat mengetahuinya.

Sinta Mutia selaku staf di bidang koperasi menegaskan “koperasi yang tidak aktif itu diakibatkan oleh kepengurusan yang tidak aktif serta dari pihak koperasi tidak mempunyai keinginan untuk menjalankan koperasi tersebut, Kami hanyalah wadah untuk menanggapi keluhan mereka serta kami mempunyai tugas untuk membina, mengawasi dan memberi arahan kepada koperasi. Pada saat kami ke lapangan yaitu koperasi, banyak pengurus yang tidak ada di tempat, ini pun suatu kendala juga, ini lah yang membuat koperasi di Aceh Barat tidak berkembang.”

Berdasarkan penjelasan dari staf koperasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Aceh Barat itu disebabkan oleh tidak adanya kepengurusan yang aktif, bantuan dari pemerintah sulit untuk di cairkan, karena kelangsungan aktifnya koperasi itu tergantung oleh pengurus dan anggotanya mau atau tidaknya membangun koperasi yang dijalankan oleh mereka.

4.3.2 Bantuan Presiden Di Masa Pandemi Covid 19

Presiden Joko Widodo meluncurkan bantuan modal kerja untuk pelaku usaha mikro. Program yang diberi nama Bantuan Presiden (BanPres) Produktif Untuk Usaha Mikro ini, merupakan upaya membantu usaha mikro, agar lebih produktif dalam berupaya pulih, serta bangkit akibat terdampak pandemi Covid-19. “Program BanPres Produktif merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu para pelaku usaha mikro menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Peluncuran BanPres di Jakarta. KemenkopUKM terus secara aktif bekerja sama dengan seluruh stakeholders, termasuk Himbara untuk menyalurkan BanPres Produktif Usaha Mikro (BanPres Produktif) ini. Target total Banpres Produktif adalah 12 juta penerima manfaat, dan sudah mulai disalurkan sejak 17 Agustus 2020 (kemenkoukm, 2020).

Yulianti S.H menyatakan Bahwa Bantuan tersebut ditujukan kepada anggota koperasi dan cuma ada tiga koperasi di Aceh Barat yang mendapatkan bantuan BanPres ini dari sekian banyak koperasi yang mengajukan bantuan, koperasi yang mendapat Banpres yaitu Koperasi Putro ijo Desa Ujoeng Tanoh Darat kecamatan Meureubo, Koperasi Wanita ingin maju bersama Desa Leuhan kecamatan Johan pahlawan, Koperasi Usaha Bersama Mukim Pasi Jeumpa kecamatan Kaway XVI.

Berdasarkan penjelasan dari staf di bidang koperasi kita dapat mengetahui bahwa dari sekian banyak koperasi di Kabupaten Aceh Barat hanya 3 koperasi yang mendapatkan koperasi dan setiap anggota koperasi mengajukan

permohonan dengan mengajukan setiap usaha ekonomi yang dapat membantu mereka pada masa pandemi covid-19 ini.

4.3.3 Permasalahan Dan Hambatan Koperasi Di Kabupaten Aceh Barat

Permasalahan dan hambatan koperasi di Kabupaten Aceh Barat yaitu:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengurus dan Pengawas mayoritas tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan koperasi dengan baik. Sehingga hal ini menyebabkan laju pertumbuhan koperasi lambat dan tujuan mensejahterakan koperasi tidak dapat terwujud dengan baik di Kabupaten Aceh Barat. Pendidikan Perkoperasian yang ada selama ini Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Perdagangan memang sudah dilakukan, Namun dilapangan masih kurang dari harapan.

2. Kekurangan Dana

Pada Masa covid 19 ini perkembangan koperasi mengalami kemunduran yang drastis dari 340 koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 hanya 18 koperasi saja yang aktif selebihnya dinyatakan tidak aktif hal ini diakibatkan kemacetan dana dari pemerintah karena pemerintah memfokuskan pada penanganan kasus covid 19 dan pada tahun 2021 ini perkoperasian tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, pemerintah lebih memokuskan bantuan ke UKM lainnya.

3. Pandemi Covid 19

Pandemi covid 19 ini sendiri yaitu wabah penyakit yang dapat berpotensi menginfeksi setiap orang dan oleh sebab itu setiap kegiatan dalam sehari-hari harus menerapkan sosial distancing agar mencegah penyebaran wabah tersebut.

Berdasarkan penelusuran dari pihak dinas perdagangan 322 koperasi di Kabupaten Aceh Barat tak aktif akibat terdampak Pandemi covid 19 di tahun 2020 dan pada tahun 2021 juga mempunyai kendala yang sama yaitu kepengurusan yang tidak aktif serta dampak yang disebabkan oleh covid 19 dimana perekonomian masyarakat terganggu khususnya anggota koperasi itu sendiri.

4. Tidak Ada Kepengurusan Yang Aktif

Pada tahun 2020-2021 banyak hal yang dihadapi oleh koperasi-kooperasi di Kabupaten Aceh Barat. Bapak Zulyadi selaku Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi menyatakan bahwa selain faktor pandemi covid 19 kepengurusan yang tidak aktif merupakan faktor lain yang berpengaruh yang mengakibatkan koperasi tidak aktif di Kabupaten Aceh Barat dan peneliti meneliti bahwa rata-rata tempat diteliti koperasi yang tidak aktif disebabkan oleh tidak adanya kepengurusan yang aktif yang membuat koperasi itu tidak aktif.

5. Permasalahan Politik

Sebagai gerakan rakyat, maka koperasi tumbuh dari bawah sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Hal itu sangat kontradiktif dengan eksistensi Departemen koperasi (DepKop). Sebagai departemen, tentu Depkop tidak tumbuh dari bawah, ia adalah alat politik yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi, Depkop adalah datang “dari atas”. Karena itu, dalam menjalankan operasinya, Depkop tetap dalam kerangka berpikir top-down. Contohnya dalam pembentukan koperasi-koperasi unit desa (KUD) oleh pemerintah. Padahal, rakyat sendiri belum paham akan gunanya KUD bagi mereka, sehingga akhirnya KUD itu tidak berkembang dan hanya menjadi justifikasi politik dari pemerintah agar timbul kesan bahwa

pemerintah telah peduli pada perekonomian rakyat, atau dalam hal ini khususnya pada koperasi.

6. Permasalahan Internal

Kurangnya tenaga profesional untuk mengembangkan Koperasi di Kabupaten Aceh Barat yang masih menghadapi berbagai permasalahan.

Disini dapat kita ketahui bahwa kurangnya Sumber Daya Manusia baik dari pihak Dinas Perdagangan maupun pihak pengurus koperasi. Serta kunjungan PKL koperasi ke koperasi-koperasi sering tidak adanya pengurus dan anggota di tempat koperasi yang dikunjungi.

7. Permasalahan Eksternal

Permasalahan eksternal yang terjadi meliputi:

1. Permasalahan ekonomi pada masa covid 19 ini mengakibatkan koperasi-koperasi tidak adanya bantuan dari pemerintah kepada koperasi-koperasi.
2. Tanggapan dari masyarakat sendiri terhadap koperasi, Masyarakat menganggap bahwa berurusan dengan koperasi itu berbelit-belit.
3. Adanya Koperasi berjalan, dimana koperasi berjalan ini lebih diminati oleh masyarakat karena proses yang dilakukan dengan instan (cepat). Namun tentunya mempunyai resiko yaitu dengan bunga yang tinggi.
4. Pada masa pandemi covid 19 ini koperasi tidak dapat Memperingati hari koperasi dimana hari tersebut merupakan Pameran karya koperasi yaitu pada tanggal 12 juli.

5. Pada masa Covid 19 ini bantuan pemerintah memfokuskan pada anggaran pada UMKM, yang mana bantuan tersebut diduga banyak salah sasaran untuk membangun ekonomi dari dampak covid 19 ini.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Analisis Perkembangan Koperasi Pada Masa Covid 19 Di Kabupaten Aceh Barat.

Perkembangan koperasi di Aceh Barat merupakan salah satu tugas dari Dinas Perdagangan untuk memajukan perekonomian di Kabupaten Aceh Barat. Dalam pelaksanaannya banyak hal yang terjadi pada koperasi koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

Pada masa pandemi covid 19 banyak koperasi yang terdampak covid 19 ini, pada tahun 2020 terdapat 140 koperasi yang terdampak dari sini dan hanya terdapat 18 koperasi saja yang aktif, pada tahun 2021 jumlah koperasi yaitu 323 unit koperasi, dan koperasi tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu koperasi aktif dan koperasi tidak aktif, dalam menentukan koperasi yang tidak aktif Nurhayati selaku staf Koperasi di Dinas Perdagangan mengatakan bahwa jika koperasi tidak melakukan rapat anggota tahunan selama 2 tahun berturut-turut maka koperasi tersebut maka pihak dari dinas perdagangan memberikan dispensasi 3 tahun berikutnya agar koperasi tersebut melakukan rapat anggota tahunan namun jika setelah dispensasi masih tidak melakukan rapat anggota tahunan maka koperasi tersebut dinyatakan tidak aktif. Nurhayati menjelaskan bahwa pada masa Pandemi ini Koperasi koperasi yang ada di Aceh Barat sangat jarang sekali melakukan rapat anggota tahunan setelah anggota dinas perdagangan terjun ke lapangan mereka mendapati

bahwa koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat selama Pandemi covid-19 ini mereka susah untuk berkumpul dan upaya protokol kesehatan menyulitkan mereka untuk melangsungkan kegiatan koperasi tersebut, serta disaat PKL yang datang mengunjungi koperasi Pengurus anggotanya tidak ada di tempat, dan dilain sisi bantuan-bantuan untuk koperasi yang diajukan oleh Koperasi koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat itu terganggu karena anggaran pemerintah dialihkan ke kasus covid-19 dan hal ini yang jadi faktor yang sangat berpengaruh bagi perkembangan koperasi di Kabupaten Aceh Barat karena suntikan dana merupakan hal yang terpenting untuk keaktifan koperasi yang mengalami kekurangan dana untuk menjalankan kegiatan koperasi yang sesuai dengan tujuan koperasi itu didirikan. Pembinaan koperasi di Kabupaten Aceh Barat dilakukan oleh dinas perdagangan ialah dengan melakukan kunjungan rutin terhadap koperasi. Pada kunjungannya dinas perdagangan harus mengantongi surat tugas dari kepala bidang koperasi setelah mendapati surat perintah tugas petugas lapangan langsung ke lokasi yang dituju pembinaan yang dilakukan mencapai 3 aspek yaitu aspek kelembagaan aspek usaha dan aspek keuangan pembinaan aspek lembaga ialah berupa pengurusan izin pembentukan koperasi, legalitas koperasi dan sebagainya. Pembinaan aspek usaha adalah pembinaan berupa penyuluhan usaha, menjelaskan bentuk usaha serta mekanisme menjalankan koperasi. Sedangkan aspek keuangan merupakan pembinaan seperti membuat laporan keuangan dan mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Pembinaan koperasi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Barat yaitu untuk memajukan perekonomian di Kabupaten Aceh Barat dan sejahterakan anggota-anggota koperasi di yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam pembinaan koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai dengan tiga aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan. Namun di lapangan tidak semua pihak merasa puas terhadap kinerja pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM tersebut, di lapangan kita mendapati ada ada koperasi yang tidak tidak puas akan kinerja pegawai dinas perdagangan yang hanya mengecek laporan keuangan dan Rapat Anggota Tahunan saja, namun mereka tidak memberikan solusi agar koperasi yang yang mereka jalankan itu itu bisa menjadi koperasi yang lebih baik hal ini terjadi di desa Pinem Kecamatan Samatiga di mana kantor koperasi yang ada di sana sudah menjadi gudang yang dulunya menjadi kedai koperasi, hal ini disampaikan oleh bapak T. Khairul.

4.4.2 Pembinaan Koperasi di Kabupaten Aceh Barat.

Perkembangan suatu koperasi tidak lepas dari suatu pembinaan, Pembinaan koperasi kepada masyarakat atau anggota koperasi itu bertujuan untuk menyadarkan akan adanya koperasi dengan tujuan untuk memudahkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pegawai Dinas Perdagangan dan pengurus koperasi juga memahami tujuan dari pembinaan koperasi tersebut. Kinerja pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam pembinaan koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai dengan tiga aspek yang yaitu aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan. Hanya saja tidak

semua pihak merasa dipuaskan terhadap kinerja pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM tersebut. Semua itu dapat dilihat dari masyarakat atau anggota yang masih belum sepenuhnya paham terhadap sistem koperasi. Aspek legalitas dari koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat sudah diakui oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan peraturan, dimana koperasi tersebut dilindungi atau dipayungi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Barat dengan berbagai dokumen hingga sah dimata hukum, berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

4.4.3 Perkembangan Koperasi Selama Pandemi Covid 19

Disini bisa kita simpulkan bahwa tidak aktifnya suatu koperasi karena tidak jalannya usaha atau kegiatan yang di jalankan koperasi tersebut serta Di sini dapat kita lihat bahwa Koperasi-koperasi di kabupaten Aceh Barat tidak memiliki keinginan untuk memajukan koperasinya, hal inilah yang membuat perkembangan koperasi di kabupaten Aceh Barat tidak berkembang. Dan seharusnya peran Dinas Perdagangan dalam melakukan pembinaan koperasi terkhusus koperasi, Seharusnya pembinaan dari pegawai atau PKL Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM itu lebih ke usaha yang akan mereka jalankan, bukan hanya untuk memeriksa Rapat Anggota Tahunan, menjalankan prosedur koperasi, dan mendata koperasi saja. Tetapi pegawai disini harus sebisa mungkin untuk membimbing serta melatih usaha yang di jalankan oleh koperasi bisa berkembang dan meningkat. Apabila usaha dari koperasi berjalan tanpa ada hambatan, koperasi tersebut akan tetap aktif. Jika koperasi itu tumbuh dan berkembang tentu tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Koperasi dapat tercapai. Jadi disini pegawai atau PKL dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM

mengevaluasi atau monitoring harus mengarahkan pelaku usaha dan kegiatan yang dijalankan koperasi tersebut terus berkembang.

Dinas Perdagangan dalam pembinaan belum efektif karena pembinaan seperti monitoring mengarahkan usaha yang akan dijalankan oleh koperasi belum berhasil hal itu membuat koperasi sulit untuk bertahan.

4.5 Kendala Yang Menghambat Dinas Perdagangan Dalam Perkembangan Koperasi Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Aceh Barat

Uraian diatas yang penulis paparkan bahwa tidak berkembangnya suatu koperasi itu karena tidak berjalannya usaha dan kegiatan dari koperasi itu sendiri, lalu yang menjadi hambatan koperasi itu berkembang dan tidak aktif adalah dari pengurus itu sendiri, serta bantuan dana dari pemerintah yang mengalami kemacetan itu dikarenakan anggaran pemerintah memfokuskan untuk menangani kasus penyebaran covid 19. Pembinaan yang seharusnya dilaksanakan adalah mengarahkan dan membina usaha yang dijalankan oleh koperasi agar berjalan lancar. Perkembangan koperasi saat ini merupakan faktor penting yang menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan pembinaan koperasi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat, karena perkembangan koperasi menunjukkan kinerja Dinas Perdagangan. Perkembangan yang dimaksud adalah terus berjalannya usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, meskipun pegawai Dinas Perdagangan telah melakukan pembinaan dengan sebaik mungkin namun usaha yang dijalankan tidak ada kemajuan pada Koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat dan terkhususnya dari dari pengurus koperasi tidak memiliki kemauan yang tinggi untuk menjalankan koperasi, tentu sulit untuk menjadikan koperasi itu berkembang dan pada akhirnya terbengkalai atau tidak

aktif.

Analisis penulis teliti bahwa perkembangan koperasi pada masa covid-19 di Kabupaten Aceh Barat hanya berkembang di Kecamatan Johan Pahlawan, serta dapat diketahui juga bahwa sumber daya manusia atau PKL dari Dinas Perdagangan dalam melakukan pembinaan masih kurang, jika jumlah pegawai yang cukup sangat membantu dalam melaksanakan tugas, namun jumlah pegawai untuk melakukan tugas pembinaan koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat saat ini dirasakan masih kurang, serta peran anggota dalam menjalankan koperasi masih kurang sehingga menghambat perkembangan koperasi dan dapat disimpulkan bahwa koperasi di Kabupaten Aceh Barat hanya beberapa koperasi yang berkembang dan rata-rata yang berkembang hanya di sekitar kawasan Kecamatan Johan Pahlawan, koperasi yang tidak mengalami perkembangan disebabkan kurangnya tidan lanjut akan koperasi oleh Dinas Perdagangan kepada koperasi serta koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat tidak menjalankan koperasi sesuai dengan arahan tujuan berdirinya koperasi tersebut, hal iniah yang menyebabkan koperasi di Kabupaten Aceh Barat kurang berkembang dan cenderung berjalan di tempat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada masa pandemi covid 19 ini perkoperasian cenderung tidak berkembang, hal ini disebabkan oleh pandemi covid 19 dan kepengurusan koperasi yang tidak aktif.
- b. Terdapat 20 jenis Koperasi di Kabupaten Aceh Barat.
- c. Koperasi koperasi kurang berkembang di Kabupaten Aceh Barat disebabkan oleh tidak adanya tidak lanjut oleh pihak Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada koperasi agar koperasi berkembang dan kurangnya keinginan dari pengurus koperasi untuk menjalankan koperasi.
- d. Faktor kekurangan dana akibat covid 19 ini juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dan kelangsungan koperasi di Kabupaten Aceh Barat.
- e. Koperasi yang mendapatkan Bantuan Presiden terdapat 3 (tiga) koperasi dari sekian banyak koperasi di Kabupaten Aceh Barat.
- f. Selama pandemi covid 19 ini kegiatan ekonomi terganggu dan sektor koperasi juga tidak luput terkena imbas covid 19 ini terutama di Kabupaten Aceh Barat.
- g. Pada masa pandemi covid-19 koperasi jarang sekali melakukan Rapat Anggota Tahunan.
- h. Koperasi yang aktif rata-rata berada di Kecamatan Johan Pahlawan.

5.2 Saran

Dengan adanya penelitian ini ada beberapa saran dari penulis:

1. Untuk pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu memperhatikan lagi perkembangan koperasi di Kabupaten Aceh Barat agar tidak terjadinya penurunan koperasi yang Aktif dan koperasi harus berkembang setiap tahunnya, Serta penerapan pencegahan covid 19 yang harus ditekankan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan ekonomi Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk Dinas Perdagangan Aceh Barat harus lebih meningkat lagi dalam hal pembinaan, pengarahan, dan dapat memberikan informasi untuk kemajuan koperasi di Kabupaten Aceh Barat..
3. Untuk pengurus diharapkan lebih peka terhadap Koperasi dan lebih mempunyai keinginan untuk memajukan koperasi agar dapat memajukannya koperasi, Serta untuk memudahkan kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi anggotaa koperasi itu sendiri.
4. Harapan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan koperasi dapat menggali lebih lanjut dampak BanPres terhadap perkembangan koperasi.
5. Harapan untuk Akademis adalah lebih mengali lagi Perkembangan koperasi pada pandemi covid 19 ini dimana permasalahan ini yang dianggap tidak penting menurut masyarakat menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan, dan mahasiswa harus peka terhadap masalah perkembangan perkoperasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesy, T. (2018) *Koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia*. Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia
- Arikunto, S. (2010) *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 112
- Bungin, B. (2013). *Metode penelitian sosial dan ekonomi*. Jakarta: Prenada Medi Group.
- Bungin, B. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Fathorrzi, M. (2002) *Ekonomi koperasi*. Jember: Repository Universitas Jember
- Fauzi, D. (2019). *Strategi Bahagia Pada Koperasi atas Maraknya Financial Technology*. Seminar nasional manajemen ekonomi dan akuntansi IV. 387
- Firdausy, M.C. (2018). *Koperasi dalam perekonomian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Hendrogi. (2007) *Azas-azas Koperasi*. Jakarta : PT Raja Garfindo Persada
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika
- Khairinal. (2020) *Pengaruh kualitas pelayanan koperasi dan perkembangan usaha koperasi terhadap partisipasi anggota koperasi berkah karya mandiri primkota jambi*. Jambi: Universitas Jambi. 9
- Komenkoukm. (2020, 24, agustus) *Bantuan Banpres untuk usaha mikro produktif*. Kamis, 2021, from Komenkoukm.go.id
- Kompas. (2020, 3, Senin). *Pengertian koperasi menurut para ahli*. Retrieved 1 Senin, 2021, from Kompas.com. 23/03/2020, 16:00.
- Maleong, L.J (1990) *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya . 165
- Manarung, S. (2019). *Pemamfaatan aplikasi customer relation manajemen pada koperasi. Application, Cooperative, CRM, Notifications, transactions*. Jurnal Vol 19 No 1 tahun 2019
- Mudhofar, B. (2020). *Strategi pengembangan usaha Primer Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (PRIMKOPTI)* Jakarta Selatan: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah. 12
- Mulya. C.F, (2018). *Membangkitkan kembali koperasi Indonesia*. Jakarta: 53
- Mulyono, F, (2010) *Mengembangkan koperasi sebagai pemberdayaan*. Vol 8, 2010
- Rohmad, A. (2012). *Analisis penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam undang-undang kopers*. Bandung. 7-10.

- Ropke, (2003) *Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Salemba Empat. 13
- Setiaji, *Pengaruh Partisipasi Anggota dan Lingkungan Usaha Terhadap Keberhasilan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kapas Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara*. Jurnal vol 3 no 7, 2009
- Siregar, A. (2019). Dampak Otonomi Daerah Dan Pemekaran Wilayah Terhadap Perkembangan Koperasi Indonesia. Jakarta. 58
- Sitepu, C.F, Hasyim (2018) Perkembangan Ekonomi Koperasi Indonesia. Vol 7, no 2 2018. sitepu
- Sriati, H. M. (2020). Analisis Kinerja Pengurus dan Hubungan Dengan Partisipasi Anggota Koperasi Di Kecamatan Tanjung Logo. Banyuasin: Universitas Sriwijaya. 1-7.
- Sugiono, (2005) *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 162
- Sukamdiyo, (1996) *Managemen koperasi*. Jakarta: Erlangga. 5
- Zulharti, S. (2020). *Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia*. Pontianak: Jurnal Vol 25, 2020. Indonesia
- Aceh.prov.go.id. *Dampak Covid 19 Bagi Perekonomian Aceh. Rabu 2021*. <http://Dampak covid 19 bagi perekonomian Aceh 2020>
- Coronavirus.jhu.edu. Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) 2020
- Covid.kemkes.go.id. <https://Covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/>. 18 maret 2021–19 maret 2021
- Perundang-undangan.go.id, (2012). *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*. 1-2
- Puspensol.go.id. (2020, 4, rabu). 11 kamis, 2020, Menganalisa Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

PERKEMBANGAN KOPERASI PADA MASA PADA COVID-19 DI KABUPATEN ACEH BARAT DI DINAS PERDAGANGAN

Nama : Sulaimi Putra Utama

Nim : 1705906010087

1. Bagaimana perkembangan koperasi di Kabupaten Aceh Barat?

Jawaban :

2. Hal apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada koperasi di Kabupaten Aceh Barat selama pandemi covid 19?

Jawaban :

3. Bagaimana penanganan koperasi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM selama pandemi covid 19?

Jawaban :

4. Apa yang menjadi masalah dan hambatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM setelah terjadinya pandemi 19 untuk mengatasi permasalahan pada perkoperasian di Kabupaten Aceh Barat?

Jawaban :

5. Bagaimana situasi covid 19 ini mengganggu keberlangsungan keaktifan koperasi di Kabupaten Aceh Barat?

Jawaban :

6. Apakah di Kabupaten Aceh Barat ada koperasi yang mendapatkan Bantuan Presiden (BanPres)?

Jawaban :

LAMPIRAN 2

PEDOMAN KUESIONER

PERKEMBANGAN KOPERASI PADA MASA PADA COVID-19 DI KABUPATEN ACEH BARAT PADA KOPERASI

Nama : Sulaimi Putra Utama

Nim : 1705906010087

1. Bagaimana perkembangan koperasi selama pandemi covid 19?
2. Bagaimana peran Dinas Perdagangan dalam memajukan koperasi?
3. Jenis koperasi apa yang berada di koperasi ini?
4. Apakah Pengurus koperasi mengurus koperasi ini agar koperasi tetap berjalan?
5. Bagaimana koperasi ini menjalankan kegiatannya?
6. Apa yang menjadi hambatan dari koperasi selama pandemi covid 19?
7. Apakah ada bantuan dari pemerintah selama pandemi covid 19?
8. Kegiatan-kegiatan apa yang telah dilakukan oleh koperasi?
9. Apakah di Kabupaten Aceh Barat ada koperasi yang mendapatkan Bantuan Presiden (BanPres)?

Dokumentasi Penelitian







Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
 Jln. Sisingamangaraja Telp. (0655) 7012805 Email: disdag.acehbarat@gmail.com
MEULABOH

SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : 530 / 2020 / VI / 2021

Kepada Yth,
 Bapak Dekan Fakultas Ekonomi
 Universitas Teuku Umar
 di-

Tempat

1. Sesuai dengan surat saudara Nomor : 588/UN59.4/LT/2021 tanggal 03 Juni 2021 hal **Permohonan Izin Penelitian Skripsi** kepada mahasiswa berikut :

Nama : Sulaiman Putra Utama
 Nim : 1705906010087
 Fakultas : Ekonomi – Universitas Teuku Umar
 Jurusan : Ekonomi Pembangunan
 Judul Penelitian : Analisis Perkembangan Koperasi pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Aceh Barat

2. Untuk maksud tersebut pihak Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh Barat tidak merasa keberatan kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data guna penyelesaian Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh.
3. Demikian surat izin melakukan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 02 Juni 2021

KEPALA DINAS PPK dan UKM
 KABUPATEN ACEH BARAT

ZULYADLSE, AK
 Pembina Tk. I
 19720828 2001121 002